

PERIODE 31 DESEMBER 2023

LAPORAN KEUANGAN

UAPPA DIPA 005.01



**PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA**



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062

Samarinda - Kalimantan Timur 75132

e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

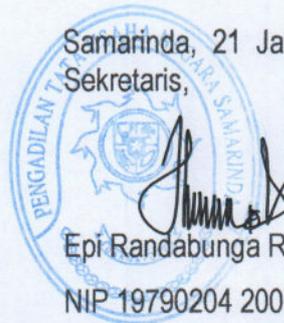
Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 21 Januari 2024

Sekretaris,



Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur 75132

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 21 Januari 2024

Sekretaris,



Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.169.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp10.734.000,- pada TA 2023.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.613.324.079,- atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.711.003.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.344.490.419,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.196.075,- ; dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.343.294.344,-;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.111.474,- dan Rp24.326.378.945,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.169.000,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.937.817.793,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.926.648.793,-). Tidak terdapat Defisit Kegiatan Non Operasional dan Tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.926.648.793,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp24.607.036.421,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.926.648.793,-) terdapat Nilai Koreksi

Rp26.467.488,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.619.523.829,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp24.326.378.946,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	10.734.000	11.169.000	0,00	11.048.000
JUMLAH PENDAPATAN		10.734.000	11.169.000	0,00	11.048.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.913.891.000	3.882.788.609	99,21	4.239.138.031
Belanja Barang	B.4	1.682.112.000	1.616.385.470	96,09	1.728.042.680
Belanja Modal	B.5	115.000.000	114.150.000	99,26	59.233.612
JUMLAH BELANJA		5.711.003.000	5.613.324.079	98,29	6.026.414.323



Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.196.075	2.564.450
Jumlah Aset Lancar		1.196.075	2.564.450
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.180.573.831	4.046.573.831
Gedung dan Bangunan	C.16	8.111.132.582	7.919.067.632
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	192.064.950
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.717.078	5.717.078
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.753.122.147)	(4.339.262.401)
Jumlah Aset Tetap		24.343.294.344	24.623.154.090
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	98.890.000	98.890.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(98.890.000)	(98.890.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.344.490.419	24.625.718.540
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	18.111.474	18.682.119
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.111.474	18.682.119
JUMLAH KEWAJIBAN		18.111.474	18.682.119
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	24.326.378.945	24.607.036.421
JUMLAH EKUITAS		24.326.378.945	24.607.036.421
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.344.490.419	24.625.718.540

Kuasa Pengguna Anggaran,

 Epi Randabunga Runggu, S.E.
 NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.169.000	11.048.000
JUMLAH PENDAPATAN		11.169.000	11.048.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.882.788.609	4.239.138.031
Beban Persediaan	D.3	58.529.550	53.288.250
Beban Barang dan Jasa	D.4	986.139.786	1.101.119.683
Beban Pemeliharaan	D.5	490.344.839	489.971.015
Beban Perjalanan Dinas	D.6	82.169.025	72.022.889
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	437.845.984	463.225.852
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5.937.817.793	6.418.765.720
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.926.648.793)	(6.407.717.720)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.926.648.793)	(6.407.717.720)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.926.648.793)	(6.407.717.720)

Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

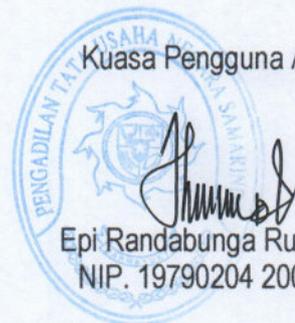
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	24.607.036.421	24.918.956.568
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.926.648.793)	(6.407.717.720)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	26.467.488	
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	26.467.488	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	-	-
JUMLAH		26.467.488	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	5.619.523.829	6.095.797.573
EKUITAS AKHIR	E.6	24.326.378.945	24.607.036.421



Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2023 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2023 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan;
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah

sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah 5 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang terjadi adalah revisi perubahan halaman 3 DIPA, ABT, dan belanja minus pegawai. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	10.734.000	10.734.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	10.734.000	10.734.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.447.640.000	3.913.891.000
Belanja Barang	1.682.112.000	1.682.112.000
Belanja Modal	5.000.000	115.000.000
Jumlah Belanja	6.134.752.000	5.711.003.000

Realisasi Pendapatan
Rp11.169.000,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.169.000,- atau 104 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp10.734.000. Pendapatan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.734.000	11.169.000	104
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	10.734.000	11.169.000	104

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami peningkatan 1,10 persen dibandingkan TA 2022. Pendapatan yang diperoleh berasal dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Peningkatan pendapatan terjadi karena rumah dinas yang dimiliki PTUN Samarinda terisi semua.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	11.169.000	11.048.000	1,10
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah	11.169.000	11.048.000	1,10

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp5.613.324.079,-*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.613.324.079,- atau 98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.711.003.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.913.891.000	3.882.788.609	99,21
Belanja Barang	1.682.112.000	1.616.385.470	96,09
Belanja Modal	115.000.000	114.150.000	99,26
Total Belanja Kotor	5.711.003.000	5.613.324.079	98,29
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5.711.003.000	5.613.324.079	98,29

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 6,85 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dikarenakan adanya mutasi keluar pegawai yang lebih besar dibandingkan jumlah mutasi masuk.
2. Menurunnya Pagu Anggaran Belanja Barang yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Karena Anggaran Langgan Daya dan Jasa Listrik sudah diambil alih oleh Mahkamah Agung RI.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.882.788.609	4.239.138.031	(8,41)
Belanja Barang	1.616.385.470	1.728.042.680	(6,46)
Belanja Modal	114.150.000	59.233.612	92,71
Jumlah	5.613.324.079	6.026.414.323	(6,85)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp3.882.788.609,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.882.788.609,- dan Rp4.239.138.031,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 8,41 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya Mutai Pegawai. dikarenakan adanya mutasi keluar pegawai yang lebih besar dibandingkan mutasi masuk pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.882.788.609	4.239.138.031	(8,41)
Belanja Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.882.788.609	4.239.138.031	(8,41)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	3.882.788.609	4.239.138.031	(8,41)

Belanja Barang

Rp1.616.385.470,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.616.385.470,- dan Rp1.728.042.680,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan 6,47 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan karena menurunnya Pagu Anggaran yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Hal ini karena peralihan Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Lisrik yang semula di bayar oleh satker sekarang diambil alih oleh Mahkamah Agung.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	948.745.907	919.589.571	3,17
Belanja Barang Non Operasional	11.290.000	990.000	-
Belanja Jasa	26.674.524	190.227.305	(85,98)
Belanja Pemeliharaan	490.344.839	489.971.015	0,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	82.169.025	72.022.889	14,09
Belanja Barang Persediaan	57.161.175	55.428.000	3,13
Jumlah Belanja Kotor	1.616.385.470	1.728.228.780	(6,47)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.616.385.470	1.728.228.780	(6,47)

Belanja Modal

Rp114.150.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp114.150.000,- dan Rp59.233.612,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 92,71 persen dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh meningkatnya jumlah Pagu Anggaran Belanja Modal yang dikelola PTUN Samarinda yaitu pembelian peralatan dan mesin untuk peningkatan fasilitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.150.000	59.233.612	92,71
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	114.150.000	59.233.612	92,71
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	114.150.000	59.233.612	92,71

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp114.150.000,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp114.150.000,- sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp59.233.612,- . Belanja Modal Peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar 92,71 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 Hal ini disebabkan oleh Meningkatnya Pagu Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian peralatan mesin berupa Pengadaan Printer guna menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan Surat Pesanan Nomor: W6-TUN3/806/PL.04/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023. Kuitansi Nomor: 0630/LTN-P2307-6281543/MMP.KW/KALTIM/08/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, BAST Nomor: W6-TUN3/909/PL1.1.2/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, SPM No. 00087A tanggal 16 Agustus 2023, dan SP2D No. 230461302014664 tanggal 16 Agustus 2023.
2. Pengadaan Lemari Arsip untuk bagian Hukum pada Pengadilan Tata

Usaha Negara. Surat Pesanan Nomor: W6-TUN3/1168/PL1.1.2/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Kuitansi Nomor: 0860/PE2-P2310-7703471/MMP.KW/KALTIM/11/2023 Tanggal 29 November 2023, BAST Nomor: W6-TUN3/1265/PL1.1.2/XI/2023 tanggal 29 November 2023, SPM No. 00120A tanggal 30 November 2023, dan SP2D No. 230461302023692 tanggal 4 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022
Printer	5.000.000	9.900.000
Laptop	0	0
PC	0	0
Lemari penyimpanan disabilitas	0	3.441.000
lemari kecil	0	1.443.000
meja layanan disabilitas	0	2.109.000
sofa ruang tunggu disabilitas	0	4.662.000
tongkat tuna netra	0	1.296.480
kursi roda	0	2.553.000
ranjang pasien	0	4.384.500
Lemari Arsip	109.150.000	
Jumlah Belanja Kotor	114.150.000	29.788.980
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	114.150.000	29.788.980

*Tidak terdapat Belanja
Penambahan Nilai
Peralatan dan Mesin*

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin TA 2023 sedangkan pada TA 2022.

*Tidak terdapat Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan*

B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Modal
Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan*

B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah Rp29.444.632,- dan tidak terdapat belanja modal Penambahan Nilai

Rp29.444.632,-

Gedung dan BangunanTA 2022.

*Tidak terdapat Belanja
Modal Penambahan
Nilai Jaringan*

B.5.6 Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Tidak terdapat Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada TA 2023 dan pada TA 2022.

*Tidak terdapat Belanja
Bantuan Sosial*

B.5.7 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Tidak Terdapat Kas di
Bendahara
Pengeluaran*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Pada TA 2023 Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- yang terbagi menjadi 2 yaitu UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. UP Tunai telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2023 dengan NTPN nomor 7217F3977F051UNB sebesar Rp4.646.622,-.

Pada Bulan Desember TA 2023 Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta TUP sebesar Rp14.203.000,- yang digunakan untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2023. Terdapat sisa TUP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2023 dengan NTPN Nomor 83B6D3977F051UJT sebesar Rp1.442.000,-.

*Tidak Terdapat Kas di
Bendahara
Penerimaan*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tidak Terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan pada 31 Desember TA 2022.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tidak Terdapat Piutang PNBP

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tidak Terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tidak Terdapat Bagian Lancar TPA

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tidak Terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp1.196.075,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.196.075,- dan Rp2.564.450,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	1.196.075	2.564.450
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.196.075	2.564.450

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dengan berita acara stok opname fisik persediaan nomor : W6-TUN3/1389/PL.07/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.

*Tidak Terdapat
Tagihan TP/TGR*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat
Tagihan Penjualan
Angsuran*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Tidak terdapat Nilai
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp16.798.993.000,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.798.993.000,-.

Tidak terdapat Mutasi nilai tanah dari TA 2022 dan 2023:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	16.798.993.000
Mutasi tambah:	
Selisih Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2023	16.798.993.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No.	Luas (m ²)	Lokasi	KIB	Nilai
1.	3000 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	11.750.550.00
2.	700 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	1.888.933.00
3.	400 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	1.078.250.00
4.	800 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	2.081.260.00
Jumlah				16.798.993.00

Keseluruhan tanah berada di Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang kelurahan Baqa, dimana peruntukan tanah seluas 3000 m2 digunakan untuk gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

sedangkan yang lainnya digunakan untuk tempat tinggal atau rumah dinas. Tanah – tanah tersebut telah bersertifikat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI pada tanggal 29 Oktober 2014, sebelumnya keseluruhan sertifikat nama an Kementrian/Lembaga (Kementrian Kehakiman).

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp4.180.573.831,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.180.573.831,- dan Rp4.046.573.831,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.046.573.831
Mutasi tambah:	
Pembelian	114.150.000
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	114.150.000
Hibah Masuk	0
Koreksi tambah	19.850.000
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	4.180.573.831
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-3.519.706.178
Nilai Buku per 31 Desember 2023	660.867.653

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Printer Anugrah MA (Pengadaan Printer) sebesar Rp4.650.000,- . Pengadaan Printer ini melalui E Purchasing. Adapun beberapa dokumen pendukung pengadaan ini adalah:
 - SP Nomor : W6-TUN3/806/PL.04/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 - Nomor ID Paket : LTN-P2307-6281543 tanggal 18 Juli 2023;
 - Nomor Kuitansi : 0630/LTN-P2307-6281543/MMP.KW/KALTIM/8 /2023 tanggal 14 Agustus 2023;
 - BAST Nomor : W6-TUN3/909/PL1.1.2/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
 - BAP W6-TUN3/910/PL1.1.2/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

- SPM No. 00087 A Tanggal 16 Agustus 2023;
 - SP2D Nomor 230461302014664 tanggal 21 Agustus 2023.
- b. Pembelian Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Pengadaan Lemari Arsip 2 Unit) sebesar Rp109.500.000,- . Pengadaan Lemari Arsip ini melalui E Purchasing. Adapun beberapa dokumen pendukung pengadaan ini adalah:
- SP Nomor : W6-TUN3/1168/PL.1.1.2/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
 - Nomor ID Paket : PE2-P2310-7703471 tanggal 23 Oktober 2023;
 - Nomor Kuitansi : 0860/PE2-P2310-7703471/MMP.KW/KALTIM/11 /2023 tanggal 29 November 2023;
 - BAST Nomor : W6-TUN3/1265/PL1.1.2/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
 - BAP W6-TUN3/1266/PL1.1.2/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
 - SPM No. 00120 A Tanggal 30 November 2023;
 - SP2D Nomor 230461302023692 tanggal 1 Desember 2023.

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp8.111.132.582,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.111.132.582,- dan Rp7.919.067.632,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.919.067.632
Mutasi tambah:	
koreksi pencatatan ke Gedung dan Bangunan	192.064.950
Mutasi kurang:	
Penilaian Revaluasi Aset Gedung dan Bangunan	0
Saldo per 31 Desember 2023	8.111.132.582
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-1.233.415.969
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.877.716.613

Terdapat koreksi tambah nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp192.064.950,- yang berasal dari Nilai Jaringan. Koreksi dilaksanakan Berdasarkan Surat Koreksi Pencatatan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Nomor W6.TUN3/1391/PL.07/II/2024 Tanggal 29 November 2023.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat
Jalan, Jaringan dan
Irigasi*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan terdapat saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp192.064.950,-.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	192.064.950
Mutasi tambah:	
- Penambahan Nilai Jaringan	0
Mutasi kurang:	
koreksi nilai jaringan	192.064.950
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Nilai Jaringan yang terdapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Jaringan Distribusi tegangan listrik diatas 20 KVA. Terjadi koreksi kurang nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp192.064.950,- ke Gedung dan Bangunan. Koreksi dilaksanakan Berdasarkan Surat Koreksi Pencatatan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Nomor W6.TUN3/1391/PL.07/II/2024 Tanggal 29 November 2023.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sama sebesar Rp5.717.078,-.

*Aset Tetap Lainnya
Rp5.717.078,-*

Aset Tetap Lainnya tersebut berupa buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.717.078
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	5.717.078
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.717.078

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat
Konstruksi Dalam
Pengerjaan*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp4.753.122.147,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp4.753.122.147,- dan Rp4.339.262.401,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan asitas manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.180.573.831	3.519.706.178	660.867.653
2	Gedung dan Bangunan	8.111.132.582	1.233.415.969	6.877.716.613
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		12.291.706.413	4.753.122.147	7.538.584.266

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp98.890.000,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp98.890.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa *software Komputer (SIAD PTUN)* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	98.890.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	98.890.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(98.890.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2023

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	98.890.000
Jumlah	98.890.000

Tidak Terdapat Aset Lain-Lain

C.22 Aset Lain-Lain

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp98.890.000,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.890.000,- dan tidak terdapat Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada 31 Desember 2022. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software Komputer	98.890.000	98.890.000	0
Jumlah	98.890.000	98.890.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	98.890.000	98.890.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tidak terdapat Saldo

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pada TA 2023 Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- yang terbagi menjadi 2 yaitu UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. UP Tunai telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2023 dengan NTPN nomor 7217F3977F051UNB sebesar Rp4.646.622,-.

Pada Bulan Desember TA 2023 Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta TUP sebesar Rp14.203.000,- yang digunakan untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2023. Terdapat sisa TUP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2023 dengan NTPN Nomor B3B6D3977F051UJT sebesar Rp1.442.000,-.

Utang kepada Pihak

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga

Rp18.682.119,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.111.474,- dan Rp18.682.119,- . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Langganan Telepon	34.357	Tagihan Telepon Desember 2023
Beban Langganan Air	527.818	Tagihan Air Desember 2023
Beban Langganan Internet	17.394.299	Tagihan Internet Desember 2023
Beban Langganan Koran	155.000	Tagihan Koran Desember 2023
Total	18.111.474	

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Beban yang Masih Harus Di Bayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp24.326.378.945,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.326.378.945,- dan Rp24.607.036.421,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB
Rp11.169.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.169.000,- dan Rp11.048.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.134.000	7.655.000	19
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	9.134.000	7.655.000	19

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua dan Hakim.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp3.822.788.609,-*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.822.788.609,- dan Rp4.239.138.031,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 1.219.014.480	Rp 1.317.054.000	- 7,44
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 17.740	Rp 18.443	- 3,81
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 71.368.610	Rp 76.220.650	- 6,37
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 22.484.890	Rp 26.185.396	- 14,13
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 40.320.000	Rp 38.700.000	4,19
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.881.370.000	Rp 2.058.775.000	- 8,62
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 242.380.289	Rp 261.545.542	- 7,33
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 60.108.600	Rp 68.799.000	- 12,63
Beban Uang Makan PNS	Rp 195.199.000	Rp 227.460.000	- 14,18
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 12.825.000	Rp 13.180.000	- 2,69
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	Rp 137.700.000	Rp 151.200.000	- 8,93
Jumlah	Rp 3.882.788.609	Rp 4.239.138.031	-8,41

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp58.529.550,-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp58.529.550,- dan Rp53.288.250,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	58.529.550	53.228.250	9,96
Jumlah	58.529.550	53.228.250	9,96

Beban Barang dan Jasa
Rp986.139.786,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp986.139.786,- dan Rp1.101.119.683,- . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	948.029.045	914.941.481	3,62
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.570.711	147.321.559	(95,54)
Beban sewa	20.025.030	27.073.243	(26,03)
Beban Non Operasional Lainnya	5.200.000	0	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	225.000	4.486.000	(94,98)
Beban Peralatan dan Mesin	6.090.000	990.000	515,15
Beban Jasa penanganan COVID	0	4.424.000	(100,00)
Beban Operasional penanganan COVID	0	1.883.400	(100,00)
Jumlah	986.139.786	1.101.119.683	(10,44)

Beban Pemeliharaan
Rp490.344.839,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp490.344.839,- dan Rp489.971.015,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan Beban Pemeliharaan terjadi karena banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki telah mencapai batas masa manfaat sehingga memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif dan adanya kenaikan harga pasar pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259.521.037	258.778.501	0,29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.943.930	165.302.473	(0,22)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan COVID-19	0	0	0,00
Beban Persediaan untuk pemeliharaan	0		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	65.879.872	65.890.041	0,00
Jumlah	490.344.839	489.971.015	0,08

*Beban Perjalanan Dinas
Rp82.169.025,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp82.169.025,- dan Rp72.022.889,- . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	82.018.525	72.022.889	13,88
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.500	0	0,00
Jumlah	82.169.025	72.022.889	14,09

*Tidak terdapat Beban
Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat Beban
Bantuan Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp437.845.984,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp437.845.984,- dan Rp463.225.852,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	245.458.190	271.080.027	-9,45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	192.387.794	187.344.201	2,69
Beban Penyusutan Jaringan	-	4.801.624	0,00
Jumlah Penyusutan	437.845.984	463.225.852	-5,48
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	437.845.984	463.225.852	(5,48)

Tidak terdapat Beban
Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022.

Tidak terdapat Surplus
dari Kegiatan Non
Operasional

D.12 Kegiatan Non Operasional

Tidak terdapat nilai pada Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan yang terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Tidak terdapat Pos Luar
Biasa

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24.607.036.421,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.607.036.421,- dan Rp24.918.956.568,-.

Defisit LO

Rp(5.926.648.793,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(5.926.648.793,-) dan Rp(6.407.717.720,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Tidak terdapat

Penyesuaian Nilai Aset

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2022. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022.

Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak Terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023,- sedangkan

pada 31 Desember 2022 terdapat selisih reval sebesar Rp408.499.000,- .

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp26.467.488,-*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.467.488,-, sedangkan pada 31 Desember 2022 tidak terdapat koreksi Aset Tetap Non Revaluasi. Koreksi ini adalah transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdapat koreksi kurang nilai Jaringan menjadi tambah nilai gedung dan Bangunan, hal ini terjadi karena ada kesalahan pencatatan tegangan Listrik diatas 20 KVA. Koreksi dilakukan Berdasarkan Surat Koreksi Pencatatan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Nomor W6.TUN3/1391/PL.07/II/2024 tanggal 29 Desember 2023. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Jaringan	-194.407.206
Gedung dan Bangunan	220.874.694
Jumlah	26.467.488

*Tidak terdapat Koreksi
Lain-Lain*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pada 31 Desember 2022.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp5.619.523.829,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.619.523.829,- dan Rp6.095.797.573,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2023`

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(11.169.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.613.324.079
Transfer Masuk	17.368.750
Jumlah	5.619.523.829

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas lain (DDEL) merupakan realisasi Penerimaan Negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi Pengembalian Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Diterima dari Entitas lain (DDEL) Pada periode hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp11.169.000,- .

Ditagihkan ke Entitas lain (DKEL) merupakan realisasi Belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Ditagihkan ke Entitas lain (DKEL) Pada periode hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp5.613.324.079,-.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp17.368.750,-. Nilai Transfer Masuk sebesar Rp17.368.750,- sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Rincian Transfer Masuk terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk TA 2023

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Badan Urusan Administrasi MA	17.368.750
Jumlah		17.368.750

Transfer Masuk yang didapat adalah Mesin Scanner (Peralatan Personal Komputer), dengan BAST Nomor: 891/BUA.7/BAST/BMN-SS/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Tidak terdapat transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Akhir

Rp24.326.378.945,-

E.6 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.326.378.945,- dan Rp24.607.036.421,-.

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset dikurangi nilai kewajiban.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian – kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, maka semua rekening pemerintah yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menampung dana APBN telah di restrukturisasi dari Rekening Giro menjadi Virtual Account. Adapun data rekening yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:

1. Rekening Virtual 653245598571000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-2732/WPB.12/KP.06/2022 tanggal 16 Oktober 2022. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01.
2. Rekening Virtual 651555598581000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-1829/WPB.12/KP.06/2022 tanggal 08 Juli 2022. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05.
3. Rekening Giro atas nama *RPL 046 PTUN Samarinda utk Biaya Perkara*, Nomor Rekening 2069-01-000153-30-2, digunakan untuk menampung Dana Titipan Pihak ke tiga. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari BUN Pusat Nomor S-2783/MK.5/2015 tanggal 27 April 2015.

F.2.3 Revisi DIPA

Selama Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan 5 kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Pertama adalah revisi perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah Pagu Anggaran, revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W6-TUN3/516/KU.01/IV/2023 Tanggal 12 April 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur dengan Nomor S-636/WPB.20/2023 Tanggal 14 April 2023. Digital Stamp tetap DS:2116-1044-0448-7064.
2. Revisi Kedua adalah revisi perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah Pagu Anggaran, revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W6-TUN3/785/KU.01/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur dengan Nomor S-1067/WPB.20/2023 Tanggal 13 Juli 2023. Digital stamp tetap DS:2116-1044-0448-7064.
3. Revisi Ketiga adalah revisi DIPA Otomatis berupa tambahan Pagu Anggaran (Belanja Modal) sebesar Rp110.000.000,-. Revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung Nomor 1534/SEK/RA.1.8/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran dengan Nomor S-407/AG/AG.5/2023 Tanggal 1 September 2023. Pagu Anggaran semula Rp6.134.752.000,- menjadi Rp6.244.752.000,-. Digital stam semula DS:2116-1044-0448-7064 menjadi DS:0611-7614-5237-5309.
4. Revisi Keempat adalah revisi DIPA Otomatis berupa Pengurangan Pagu Belanja Pegawai untuk penyelesaian Pagu Minus Pegawai di bawah Mahkamah Agung RI. Revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2793/SEK/RA.1.6/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-356/PB.2/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Pagu Anggaran semula Rp6.244.752.000,- menjadi Rp5.711.003.000,-. Digital stam semula DS:0611-7614-5237-

5309 menjadi DS:2045-2015-8891-7583.

5. Revisi Kelima adalah revisi DIPA untuk menyesuaikan anggaran Belanja Barang dan Belanja Pegawai. Revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W6-TUN3/1324/RA1.8/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-2000/WPB.20/2023 tanggal 14 Desember 2023. Revisi tidak merubah Pagu DIPA sebesar Rp5.711.003.000 dan Digital stam yaitu DS:2045-2015-8891-7583.

F.2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode TA 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W6-TUN3/28/KU.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan. SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W2-TUN5/26/KU.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W2.TUN5/57/KU.01/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengelola Sakpa/SAI.

Adapun Nama-nama dalam SK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
Usaha Negara Samarinda	Pejabat Penanda Tangan /Penguji SPM	Epi Randabunga Rungngu, S.E
	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni, SH
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rindana P.A Hutabarat, S.H

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
			Per 31-12-2022	Tahun 2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023
A	Tanah					
1	Tanah	16.798.993.000	-	-	-	16.798.993.000
	Jumlah	16.798.993.000	-	-	-	16.798.993.000
B	Peralatan dan Mesin					
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.150.449.441	688.170.866	102.728.572	790.899.438	359.550.003
2	Alat Angkut Darat Tak Bermotor	2.553.000	638.250	1.276.500	1.914.750	638.250
3	Alat Kantor	586.433.525	461.055.325	16.050.400	477.105.725	109.327.800
4	Alat Rumah Tangga	1.211.857.395	1.142.943.445	24.745.100	1.167.688.545	44.168.850
5	Alat Komunikasi	10.400.000	7.859.000	726.000	8.585.000	1.815.000
6	Komputer Unit	835.322.300	679.230.775	65.434.275	744.665.050	90.657.250
7	Peralatan Komputer	285.599.690	240.802.617	22.712.073	263.514.690	22.085.000
8	Alat Khusus Kepolisian	1.296.480	162.060	324.120	486.180	810.300
9	Peralatan Pemancar	21.950.000	21.950.000	-	21.950.000	-
10	Alat Studio	74.712.000	28.954.400	13.942.400	42.896.800	31.815.200
	Jumlah	4.180.573.831	3.271.766.738	247.939.440	3.519.706.178	660.867.653
C	Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.471.027.582	751.320.906	142.943.768	894.264.674	5.576.762.908
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.319.970.000	249.035.674	44.995.784	294.031.458	1.025.938.542
3	Tugu/Tanda Batas	320.135.000	38.329.339	6.790.498	45.119.837	275.015.163
	Jumlah	8.111.132.582	1.038.685.919	194.730.050	1.233.415.969	6.877.716.613
D	JARINGAN					
1	JARINGAN LISTRIK	0	28.809.744	(28.809.744)	-	-
	Jumlah	0	28.809.744	-28.809.744	0	0
E	ASET TETAP LAINNYA					
1	Bahan Perpustakaan Cetak	5.717.078	-	-	-	5.717.078
	Jumlah	5.717.078	0	0	0	5.717.078
	Total	29.096.416.491	4.339.262.401	413.859.746	4.753.122.147	24.343.294.344

*Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
 PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
Jumlah				Rp -	Rp -	Rp -	-